



BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2025 Page 2186-2202

DOI: <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1214>

# Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Tania Damme Sihombing<sup>1</sup>, Latersia Br. Gurusinga<sup>2</sup>, Yusnaini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis MULTISMART

✉ Corresponding author

[dammetania@gmail.com](mailto:dammetania@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka penguatan kapasitas keuangan daerah serta pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, dan analisis dokumen, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2021–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren peningkatan realisasi PAD dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di sejumlah kabupaten/kota tergolong cukup hingga sangat efektif, kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi belum merata. Ketergantungan pada jenis penerimaan tertentu dan rendahnya proporsi belanja modal produktif menjadi kendala utama dalam optimalisasi pemanfaatan PAD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas kinerja keuangan daerah memerlukan diversifikasi sumber PAD, penguatan sistem pengelolaan keuangan, serta pengalokasian anggaran ke sektor strategis yang

berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Sumatera Utara*

#### Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the financial performance of the Government of North Sumatra Province in increasing Regional Original Revenue (PAD) to stimulate regional economic growth. The study is grounded in the importance of effective and efficient regional financial management as a means to strengthen regional financial capacity and ensure equitable economic development across all areas. The research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as literature review, observation, and document analysis, including Budget Realization Reports (LRA), Regional Government Financial Reports (LKPD), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) data from 33 regencies/cities in North Sumatra Province during the 2021–2023 period. The findings reveal that although there is a growing trend in PAD realization and the financial management effectiveness in several regencies/cities is categorized as fairly to highly effective, the contribution of PAD to economic growth remains uneven. Dependence on specific types of revenue and the low proportion of productive capital expenditures are the main obstacles to optimizing the use of PAD. This study concludes that improving the effectiveness of regional financial performance requires diversification of PAD sources, strengthening of financial management systems, and allocating budgets to strategic and productive sectors that directly support inclusive and sustainable economic growth in North Sumatra Province.

Keywords: *Effectiveness Of Regional Financial Performance, Regional Original Revenue (PAD), Economic Growth, North Sumatra*

#### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pembangunan ekonomi tidak hanya ditandai oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga oleh bagaimana pertumbuhan tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, dan penurunan tingkat kemiskinan (Bank Indonesia, 2022). Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan yang mencerminkan kemandirian fiskal.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi ekonomi besar dengan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan industri. Letak geografis yang strategis dan jumlah penduduk yang tinggi seharusnya menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terefleksi dalam pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah kabupaten/kota. Ketimpangan antarwilayah, perbedaan kapasitas fiskal, serta kurang optimalnya pengelolaan keuangan menjadi isu yang terus berulang.

Tabel 1. Kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Klasifikasi Wilayah

Klasifikasi Wilayah	Kondisi Ekonomi
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya memiliki sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan (sawit dan karet), perikanan, pariwisata, dan industri. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi, memiliki Tingkat PAD (Pendapatan Asli Daerah) pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena menjadi pusat perdagangan dan jasa di Sumatera Utara. Kota Pematangsiantar, Tanjung Balai, dan Binjai juga memiliki perekonomian yang berkembang pesat.
Tingkat Pendapatan Asli Daerah	Kota besar seperti Medan dan Kabupaten Deli Serdang umumnya memiliki PAD yang tinggi karena aktivitas perekonomian yang beragam, meliputi perdagangan, pariwisata, dan industri. Di sisi lain, kabupaten/kota di wilayah terpencil seperti Nias dan Mandailing Natal cenderung memiliki PAD yang lebih rendah, dengan ketergantungan pada transfer pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sumber: Pokhrel, 2024

Berdasarkan Tabel 1, wilayah dengan diversifikasi sektor ekonomi dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya serta pasar cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi dan PAD yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah terpencil 3 dengan akses terbatas dan ketergantungan pada sektor tradisional memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan PAD.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya menilai efektivitas kinerja keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan PAD sebagai dasar pembiayaan pembangunan. PAD tidak hanya sekadar angka penerimaan, melainkan juga cerminan dari seberapa mampu pemerintah daerah menggali potensi ekonomi lokal secara optimal dan berkelanjutan (Mahmudi, 2021). Efektivitas pengelolaan PAD pun erat kaitannya dengan pencapaian target anggaran, efisiensi belanja, dan dampaknya terhadap peningkatan PDRB serta kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan realisasi PAD di Wilayah Pemerintahan Sumatera Utara untuk periode 2021-2023.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara  
Periode 2021-2023

KABUPATEN / KOTA PROV SUMUT	TAHUN		
	2021	2022	2023
Nias	103.944.559.551	93.363.082.412	15.941.012.826
Mandailing Natal	100.203.036.445	110.771.193.487	113.377.283.040
Tapanuli Selatan	200.000.000	44.232.440.395	79.055.291.558
Tapanuli Tengah	84.474.937.965	98.299.009.115	57.096.503.412
Tapanuli Utara	170.000.000	124.889.099	200.000.000
Toba Samosir	99.378.827.847	109.150.487.310	85.060.000.000
Labuhanbatu	102.560.789.211	123.870.450.000	562.670.890.000
Asahan	69.612.654.520	42.000.000.000	169.216.958.883
Simalungun	160.456.714.000	147.530.000.000	199.364.000.000
Dairi	47.313.149.908	54.655.578.052	229.440.034.333
Karo	89.753.026.646	102.652.693.857	128.890.981.789
Deli Serdang	513.100.780.416	4.202.535.350.834	4.389.000.000.000
Langkat	158.480.919.712	120.290.981.997	225.400.000.000
Nias Selatan	36.104.922.850	38.224.000.000	36.104.922.850
Humbang Hasundutan	78.124.814.216	218.720.745	42.109.811.950
Pakpak Bharat	528.849.791	333.908.898	612.823.098
Samosir	36.521.674.716	32.890.141.717	77.259.718.427
Serdang Bedagai	213.376.559.000	117.600.000.000	176.810.427.811
Batu Bara	194.694.781.900	161.997.313.940	146.970.811.911
Padang Lawas Utara	85.000.000.000	38.609.058.252	87.851.810.100
Padang Lawas	85.000.000.000	87.849.412.000	78.490.810.710
Labuhanbatu Selatan	45.081.411.000	56.839.547.000	48.660.095.000

Labuhanbatu Utara	39.900.000.000	82.700.000.000	90.000.000.000
Nias Utara	98.061.811.811	56.381.911.844	19.531.874.000
Nias Barat	19.102.490.000	8.863.468.710	21.763.900.000
Sibolga	89.181.856.201	48.819.187.846	98.020.100.000
Tanjung Balai	75.840.000.000	48.819.187.846	98.020.100.000
Pematang Siantar	103.290.000.000	61.400.000.000	76.840.000.000
Tebing Tinggi	107.524.586.000	55.890.000.000	100.336.509.681
Medan	1.900.000.0000	55.890.000.000	1.003.800.000.890
Binjai	137.551.000.000	2.050.000.000	3.650.000.000.000
Padang Sidempuan	83.890.000.000	64.516.173.405	2.900.000.000
Gunung Sitoli	28.200.000.000	46.394.547.875	90.760.000.120
Gunung Sitoli	28.200.000.000	46.394.547.875	90.760.000.120

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2021 - 2023

Data dari Badan Pusat Statistik (2021–2023) menunjukkan bahwa beberapa daerah di Sumatera Utara mengalami fluktuasi PAD yang signifikan. Misalnya, Kabupaten Nias mengalami penurunan PAD drastis dari Rp103,9 miliar pada 2021 menjadi hanya Rp15,9 miliar pada 2023. Fenomena serupa juga terjadi di Humbang Hasundutan dan Nias Utara. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi perencanaan, implementasi, maupun pengawasan.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memahami hubungan antara efektivitas pengelolaan keuangan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, bagaimana PAD sebagai hasil dari kinerja keuangan daerah mampu mendorong aktivitas ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Analisis ini juga relevan sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan keuangan daerah yang lebih strategis dan tepat sasaran.

Berdasarkan latar tersebut, penulis merasa perlu mengangkat topik “Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.” Penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka-angka PAD dan PDRB semata, tetapi juga pada makna di balik efektivitas kebijakan fiskal

pemerintah daerah serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang di Provinsi Sumatera Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Efektivitas

Organisasi merupakan konsep kunci dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan tepat sasaran (Robbins & Coulter, 2021). Dalam konteks pemerintahan daerah, keberhasilan pencapaian target keuangan dan pembangunan menjadi indikator utama efektivitas. Menurut Stress (2020), efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain:

- (1) Kepemimpinan yang visioner dan kompeten
- (2) Sistem dan prosedur keuangan yang jelas dan konsisten
- (3) Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan; serta
- (4) Infrastruktur teknologi informasi yang mendukung transparansi dan efisiensi.

### 2. Teori Kinerja

Teori kinerja menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Model yang umum digunakan adalah pendekatan 3E: Economy (efisiensi biaya), Efficiency (perbandingan input-output), dan Effectiveness (pencapaian tujuan) (Pokhrel, 2024). Dalam konteks keuangan daerah, kinerja diukur melalui kemampuan pemerintah dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, mengendalikan biaya operasional, meningkatkan belanja modal produktif, serta merealisasikan anggaran sesuai prioritas pembangunan (Sedarmayanti, 2024).

### 3. Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan indikator kemandirian fiskal daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menggali potensi ekonomi lokal tanpa ketergantungan pada transfer pusat. Komponen utama PAD meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Kuncoro, 2023). Contoh pajak daerah seperti:

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- (3) Pajak Hotel
- (4) Pajak Restoran

Kontribusi besar terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi lokal (Suhendra, 2020). Sementara itu, retribusi daerah seperti retribusi pelayanan kesehatan, pasar, dan perizinan usaha memberikan imbal balik atas pelayanan publik dan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan efisiensi pelayanan (Retno & Hartono, 2021).

### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan output barang dan jasa suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Pokhrel, 2024). Pertumbuhan ini ditentukan oleh berbagai faktor, di antaranya:

- (a) Investasi
- (b) Kualitas Tenaga
- (c) Kemajuan Teknologi
- (d) Infrastruktur Ekonomi
- (e) Kebijakan Fiskal Dan Moneter

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan fenomena secara holistik melalui data naratif dan deskriptif, yang diperoleh dari dokumen dan literatur yang dianalisis secara induktif untuk menemukan pola dan makna sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2020).

Objek penelitian difokuskan pada pengelolaan anggaran daerah, khususnya pemanfaatan sumber PAD seperti pajak daerah dan retribusi, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan berupa data kualitatif, terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi terhadap dokumen resmi pemerintah, dan data sekunder dari laporan keuangan, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal akademik, serta dokumen kebijakan.

Penelitian ini melibatkan seluruh 33 daerah (25 kabupaten dan 8 kota) sebagai sampel, dengan menggunakan teknik sampling jenuh, sesuai dengan penjelasan Sugiyono (2020). Tujuan dari pemilihan teknik ini adalah untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh provinsi yang diteliti.

Definisi operasional penelitian mencakup beberapa indikator kunci. Efektivitas pajak daerah diukur dari rasio realisasi pendapatan terhadap target anggaran, berdasarkan kriteria dari Mahmudi (2021). Efektivitas ini mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi target PAD. Selain itu, kinerja keuangan dijadikan indikator keberhasilan pelaksanaan anggaran, dan pertumbuhan ekonomi dinilai dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai representasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Instrumen penelitian berupa lembar analisis dokumen dan matriks kategorisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2024), digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan hubungan antara variabel-variabel utama seperti efektivitas keuangan, PAD, dan pertumbuhan ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan riset daring dengan mengakses situs-situs resmi seperti BPS dan portal pemerintah.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mengikuti tiga tahap utama menurut Miles dan Huberman (2024): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini memungkinkan penyusunan narasi yang sistematis dan tematik dari data yang diperoleh. Selain itu, digunakan juga statistik deskriptif untuk menyajikan data numerik seperti persentase efektivitas dan tingkat pertumbuhan PAD, sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks kuantitatif atas hasil penelitian (Fuaddi, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri atas 25 kabupaten dan 8 kota. Sumatera Utara dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Provinsi ini memiliki berbagai sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, industri, dan perdagangan. Keberagaman ini menjadikan wilayah ini sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola PAD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan PAD dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara selama periode 2021 hingga 2023. Analisis difokuskan pada efektivitas realisasi PAD dibandingkan target yang ditetapkan, serta keterkaitan antara peningkatan PAD dan pertumbuhan PDRB sebagai indikator ekonomi makro daerah.

Hasil

Efektivitas Kinerja Keuangan dan Realisasi PAD

Tabel 3. Efektivitas Kinerja Keuangan terhadap Realisasi PAD

Wilayah	2021		2022		2023	
	%	Kategori	%	Kategori	%	Kategori
Nias	182	SE	158	SE	160	SE
Mandailing Natal	176	SE	188	SE	113	SE
Tapanuli Selatan	-	-	75	KE	79	TE
Tapanuli Tengah	148	SE	167	SE	157	SE
Tapanuli Utara	52,51	TE	-	-	-	-
Toba Samosir	174	SE	185	SE	185	SE
Labuhanbatu	180	SE	162	SE	104	SE
Asahan	63,25	SE	96,8	CE	99,87	E
Simalungun	83	KE	105	E	83	KE
Dairi	83	KE	62	TE	22,5	TE
Karo	99,8	SE	62	TE	84	KE
Deli Serdang	99	CE	71,21	TE	43,89	TE
Langkat	78	E	58	TE	102	SE
Nias Selatan	40	TE	44,3	TE	23	TE
Humbang Hasundutan	99,6	SE	100	E	88,67	KE
Pakpak Bharat	65	TE	68,3	TE	99	CE
Samosir	64	TE	75,55	KE	87	KE
Serdang Bedagai	98,4	CE	81,44	KE	102,21	SE
Batu Bara	45,7	TE	13,7	TE	12,5	TE
Padang Lawas Utara	54,5	TE	88	KE	79	KE
Padang Lawas	54,5	TE	88	KE	78	KE
Labuhanbatu Selatan	79	KE	16,8	TE	71	KE
Labuhanbatu Utara	70	TE	104,4	SE	55	TE
Nias Utara	172	SE	101	SE	100	S
Nias Barat	70,82	TE	84	KE	98,82	CE
Sibolga	73,94	SE	18	TE	98	CE
Tanjung Balai	133	SE	83	KE	98	CE
Pematang Siantar	181	SE	104	SE	77	KE
Tebing Tinggi	188	SE	95	CE	100	E
Medan	33,9	TE	83,5	CE	104	SE
Binjai	41,2	TE	45,48	TE	36,50	TE
Padang Sidempuan	79	SE	12	TE	12	TE
Gunung Sitoli	49	TE	40,45	TE	79	CE

Keterangan :

SE : Sangat Efektif

E : Efektif

CE : Cukup Efektif

KE : Kurang Efektif

TE : Tidak Efektif

Berdasarkan tabel 3 efektivitas penerimaan PAD yang disajikan, terlihat pola kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara yang sangat bervariasi dari tahun ke tahun dan antar daerah. Secara umum, daerah-daerah dengan tingkat efektivitas tinggi (kategori Sangat Efektif / SE) sebagian besar dapat dicapai oleh daerah yang mengandalkan pajak daerah dengan sistem intensifikasi dan ekstensifikasi yang matang, seperti Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, dan Toba Samosir, khususnya pada tahun 2021 dan 2022. Daerah-daerah ini menunjukkan kemampuan untuk merealisasikan target PAD dengan nilai persentase jauh di atas 100%, yang mengindikasikan keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah dari pos-pos yang ada.

Namun, terdapat juga daerah-daerah dengan tingkat efektivitas yang cenderung rendah, bahkan berada dalam kategori Tidak Efektif (TE) dari tahun ke tahun. Contohnya adalah daerah seperti Binjai, Padang Sidempuan, dan Batu Bara yang sebagian besar berada di kategori TE, mengindikasikan bahwa daerah-daerah ini belum sepenuhnya memaksimalkan potensi PAD-nya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk terbatasnya basis pajak daerah, belum optimalnya implementasi sistem digitalisasi penerimaan daerah, hingga belum memadainya mekanisme pengawasan dan pengelolaan PAD.

Di samping itu, terdapat daerah-daerah yang berada di kategori Cukup Efektif (CE) dan Efektif (E), seperti Asahan, Pakpak Bharat, dan Tebing Tinggi, yang memberikan gambaran bahwa daerah-daerah ini berada dalam proses transisi dari tingkat efektivitas sedang menuju tingkat yang lebih tinggi. Mereka memperlihatkan pola perbaikan dari tahun ke tahun, yang dapat dijadikan contoh bagi daerah lain untuk memperbaiki sistem pengelolaannya. Tingkat efektivitas penerimaan PAD belum sepenuhnya merata di seluruh daerah Provinsi Sumatera Utara. Beberapa daerah telah berhasil memaksimalkan potensi penerimaan daerah dan memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah, sementara daerah lainnya masih perlu melakukan pembenahan mendalam dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari sisi intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi penerimaan daerah. Dengan pola kinerja yang demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan daerah dalam mengelola PAD

bukan hanya soal kemampuan memenuhi target angka penerimaan, tetapi juga soal kualitas pengelolaan yang dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan.

## Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Daerah	Tingkat Persentase		
	2021	2022	2023
Nias	2,21%	3,03%	3,82%
Mandailing Natal	3,20%	4,34%	4,34%
Tapanuli Selatan	3,34%	4,78%	5,11%
Tapanuli Tengah	2,56%	4,28%	4,23%
Tapanuli Utara	3,54%	4,25%	4,75%
Toba Samosir	2,92%	4,24%	4,93%
Labuhanbatu	3,85%	4,80%	5,03%
Asahan	3,78%	4,66%	4,78%
Simalungun	3,70%	4,68%	5,07%
Dairi	2,05%	4,21%	5,04%
Karo	2,92%	4,24%	4,93%
Deli Serdang	2,23%	4,70%	5,34%
Langkat	3,08%	4,69%	-
Nias Selatan	2,02%	3,08%	3,68%
Humbang Hasundutan	2,02%	4,21%	4,21%
Pakpak Bharat	2,54%	4,27%	5,10%
Samosir	2,65%	4,48%	5,03%
Serdang Bedagai	2,87%	4,46%	-
Batu Bara	2,35%	4,07%	4,08%
Padang Lawas Utara	3,26%	4,12%	4,92%
Padang Lawas	3,83%	4,61%	5,14%
Labuhanbatu Selatan	3,82%	4,74%	4,94%
Labuhanbatu Utara	4,26%	4,80%	4,76%
Nias Utara	2,02%	3,03%	3,79%
Nias Barat	2,26%	3,01%	3,72%
Sibolga	2,10%	4,15%	4,20%
Tanjung Balai	2,35%	3,94%	4,86%
Pematang Siantar	1,25%	3,47%	4,22%
Tebing Tinggi	2,51%	4,01%	3,98%
Medan	2,62%	4,71%	5,04%

Binjai	2,23%	4,18%	3,98%
Padang Sidempuan	2,75%	4,77%	5,09%
Gunung Sitoli	2,25%	3,11%	3,69%

Berdasarkan tabel 4 data pertumbuhan ekonomi daerah di Sumatera Utara dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat bahwa sebagian besar kabupaten dan kota mengalami tren pertumbuhan yang positif dan konsisten. Setelah angka pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 2021, sebagian besar daerah berhasil mencatatkan peningkatan signifikan pada tahun 2022, yang kemudian terus berlanjut hingga tahun 2023. Daerah-daerah seperti Deli Serdang, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan bahkan dapat tumbuh di atas angka 5% di tahun 2023, yang menandakan daya pulih dan adaptasi ekonomi daerah yang semakin kuat pascapandemi. Peningkatan ini juga mencerminkan keberhasilan daerah dalam memanfaatkan berbagai sektor potensial, mulai dari pertanian, perdagangan, jasa, hingga konstruksi dan transportasi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perekonomian daerah-daerah di Sumatera Utara berada dengan tingkat pertumbuhan yang terus bergerak naik dan membawa harapan bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut

## Pembahasan

### Bagaimana Efektivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas tercermin dari berbagai strategi yang diterapkan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya tersebut meliputi optimalisasi pajak daerah dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan dan pelaporan. Pemerintah juga mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan memperluas basis pajak, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki mekanisme penagihan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021) Komitmen pemerintah dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan diwujudkan melalui digitalisasi sistem keuangan daerah, seperti penerapan aplikasi e-tax yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun strategi peningkatan PAD secara terintegrasi.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari LRA, LKPD, dan data PDRB Provinsi Sumatera Utara tahun 2020–2023, penulis mengidentifikasi sejumlah temuan penting yang

relevan dengan fokus kajian. Pertama, dari sisi efektivitas realisasi PAD, data menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara umum mampu merealisasikan target PAD dengan cukup baik. Pada tahun 2020, efektivitas mengalami penurunan akibat dampak COVID-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu dan penerimaan daerah merosot, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya, yakni 2021 hingga 2023, terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Rasio efektivitas PAD mendekati atau bahkan melebihi 100%, yang mengindikasikan bahwa pemerintah mampu memaksimalkan potensi penerimaan dari sumber-sumber yang ada.

Efektivitas yang tinggi dalam pencapaian PAD tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan yang utuh dalam hal kualitas pengelolaan keuangan. Hal ini karena struktur PAD Provinsi Sumatera Utara masih sangat bergantung pada beberapa jenis pajak dominan, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ketergantungan terhadap sumber pendapatan tertentu membuat struktur PAD menjadi rentan terhadap gangguan eksternal, seperti penurunan daya beli masyarakat atau perubahan kebijakan nasional.

Dari hasil analisis terhadap data pertumbuhan ekonomi, diketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi pertumbuhan PDRB pada periode 2021–2023. Tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan akibat global, namun pada 2021 dan 2022, ekonomi mulai pulih dan mencatatkan pertumbuhan positif. Tahun 2023 menunjukkan pemulihan yang lebih kuat dengan kontribusi besar dari pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Namun, peningkatan PAD tidak selalu diikuti secara langsung oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi secara proporsional. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD belum sepenuhnya dialokasikan ke sektor produktif yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi secara nyata dan berkelanjutan.

Perspektif kinerja pengelolaan keuangan, efektivitas tidak hanya diukur dari capaian angka realisasi PAD terhadap target, tetapi juga dari bagaimana pemerintah daerah mengelola pengeluaran untuk mendorong pembangunan. Temuan menunjukkan bahwa sektor besar belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional, sedangkan belanja modal yang bersifat produktif belum mendapatkan porsi yang optimal. Belanja modal seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dan dukungan terhadap sektor unggulan daerah sangat diperlukan untuk memperkuat basis ekonomi dan memperbesar efek berganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi. (Kurniawan T, 2020 )

Meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas keuangan, seperti melalui intensifikasi pajak, digitalisasi layanan perpajakan daerah, serta

penguatan koordinasi antar-instansi, namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan daerah, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas anggaran, serta masih minimnya inovasi dalam menggali potensi pendapatan baru yang sah dan berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat pentingnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilihat dari sisi pencapaian pendapatan, tetapi juga dari sisi kualitas belanja daerah dan kontribusinya terhadap sektor makro seperti pertumbuhan ekonomi. Efektivitas yang sejati adalah setiap rupiah yang diperoleh dari PAD dapat dikembalikan dalam bentuk pembangunan yang berdaya guna dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

Bagaimana tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?

Berdasarkan analisis data kualitatif terhadap laporan keuangan daerah dan data PDRB di Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini mengungkap tiga tema utama yang mencerminkan pola dalam efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun PAD di Sumatera Utara mengalami tren peningkatan, khususnya pada periode 2021–2023, hal ini belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara keberhasilan pencapaian target PAD—yang pada 2022 dan 2023 bahkan melampaui 100% efektivitas—dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan. Peningkatan PAD tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, karena sebagian besar masih dialokasikan pada belanja operasional, yang berdampak rendah terhadap aktivitas ekonomi riil dan tidak memiliki efek berganda yang kuat.

Minimnya alokasi pada belanja modal menjadi salah satu penyebab utama dari lemahnya kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal, belanja modal seperti pembangunan infrastruktur, dukungan bagi UMKM, serta investasi pada pengembangan sumber daya manusia memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan oleh Oktaviani dan Sadikin (2022), penggunaan PAD yang tidak diarahkan pada sektor-sektor produktif memperlambat terciptanya efek pengganda fiskal terhadap sektor riil.

Selain itu, struktur PAD Sumatera Utara masih terlalu bergantung pada jenis penerimaan tertentu, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ketergantungan ini menjadikan PAD rentan terhadap perubahan ekonomi makro dan kebijakan nasional, sehingga stabilitas dan keberlanjutannya menjadi lemah. Ketimpangan antarwilayah juga menjadi hambatan, karena tidak semua kabupaten/kota memiliki tingkat pengembangan infrastruktur dan akses ekonomi yang merata, yang menyebabkan kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara adil di seluruh provinsi.

Meski begitu, terdapat tanda-tanda perbaikan. Pemerintah daerah mulai menjalankan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan pendapatan, serta mengoptimalkan aset daerah dan membangun kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal. Langkah-langkah ini ditujukan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan menjadikan PAD tidak hanya sebagai alat pendanaan, tetapi juga sebagai motor pembangunan ekonomi yang inklusif. Namun demikian, efektivitas PAD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan melalui reformasi kelembagaan, perencanaan anggaran yang lebih berorientasi produktivitas, dan alokasi belanja yang lebih strategis.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan nilai PAD dari tahun ke tahun, namun tingkat efektivitasnya belum sepenuhnya maksimal. Ketergantungan yang tinggi pada beberapa jenis penerimaan, seperti pajak kendaraan bermotor dan retribusi jasa usaha, membuat struktur PAD belum sepenuhnya dapat menopang kebutuhan pembangunan daerah secara merata dan inklusif. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperluas dan mendiversifikasi sumber-sumber PAD serta memperbaiki sistem pengelolaannya agar dapat digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Peningkatan PAD di Sumatera Utara belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun PAD tumbuh dari tahun ke tahun, belum terlihat kesinambungan dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, pengelolaan PAD perlu dioptimalkan dengan mengarahkan alokasi anggaran ke sektor-sektor strategis dan

produktif, sehingga dapat memberi efek multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Sumatera Utara*.
- B.P.S. Labuhanbatu. (2021). *Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka 2021*. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
- Hasibuan, S. R., Harahap, I., & Tambunan, K. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 272–285.
- Hastuti, N. S., & Nasution, D. A. D. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara)*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 24(2), 157–170.
- Munizu, M., Tandiono, R., Pravitasari, E., Kardini, N. L., Hendrawan, H., Nur, T., ... & Manuaba, I. B. K. (2023). *UMKM: Peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). *Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 303–318.
- Purba, W., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2022). *Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 62–74.
- Rahmi, S. N., Simanungkalit, J. F., & Suharianto, J. (2025). *Pengaruh Pengeluaran, Inflasi Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Presentase Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatra Utara*. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 5783–5795.
- Ramadhan, P. R. (2019). *Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81–87.
- Remanta, O. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi di Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(2), 457–465.
- Rifka Kusuwardani. (2021). *Pengaruh Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bandung Tahun 2021*. Skripsi. Program Sarjana IESP, Universitas Syarif Hidayatullah.

- Saknosiwi, Y. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(3), 37–45.
- Safira, R., & Yafiz, M. (2022). *Analisis Pengaruh Kontribusi BUMD terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(7), 1887–1896.
- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018–2020*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410–415.
- Susilawati, I., Miharja, K., Diwantari, I., & Salsabila, L. P. (2024). *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Akuntansi terhadap Pengendalian Internal Akuntansi*. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(3), 60–74.
- Tampubolon, S. F., Tamba, R., Sirait, R. V., Wildan, R. F. R., Siregar, T. M., & Frisoiry, S. (2024). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 357–364.
- Wandasari, D., & Daulay, A. N. (2023). *Analisis Value for Money dalam Mengukur Kinerja Keuangan: Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara*. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(4), 86–96.